



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. ASRI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 484011

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 570.820.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KOTA PALU ,
LAINNYA Rp. 137.520.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA PALU ,
LAINNYA Rp. 130.420.000
3. Tanah Seluas 383 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp.
62.880.000
4. Tanah Seluas 1582 m2 di KOTA PALU , LAINNYA Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/36 m2 di KOTA MAKASSAR ,
LAINNYA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 264.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SCOOTER Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.250.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 836.070.000

III. HUTANG Rp. 147.600.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 688.470.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

